

B 28

ISBN : 978-979-26-1970-6

PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN



SAMBUTAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT. Kami memuji, memohon pertolongan serta memohon ampunan kepada-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya Alhamdulillah hari ini, Rabu, 14 Agustus 2013 kita dapat memperingati Dies Natalis ke-63 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), saya selalu berdoa semoga FIP tetap jaya.

Sebagai wujud rasa syukur telah memasuki usia ke-63, FIP UNY menyelenggarakan beberapa agenda untuk memperingati Dies Natalis ke-63 FIP UNY. Salah satu agenda penting yang diselenggarakan FIP adalah penulisan buku yang bertajuk *Pendidikan Populis Berwawasan Budaya*. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam peran ilmu pendidikan dalam menjelaskan berbagai dinamika fenomena sosial selama ini. Penjelasan komprehensif tentang isu-isu pendidikan yang berkembang selama ini diharapkan dapat terwujud melalui buku ini. Begitu juga kajian pragmatik solutif dalam buku ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah - masalah pendidikan kita. Melalui penulisan buku ini para dosen dari berbagai program studi di FIP berkontribusi untuk memecahkan masalah pendidikan dari perspektif prodinya masing - masing. Kesadaran program studi sebagai kamar (yang bersinergi dengan kamar lain) yang berada di rumah besar FIP, diharapkan dapat terwujud melalui penulisan buku ini, sehingga mereka tidak terjebak pada sekat-sekat sempit program studi.

Sebagai pimpinan fakultas saya menyampaikan penghargaan dan **terimakasih** kepada para penulis yang telah memberikan sumbangan **pemikirannya** sehingga buku ini dapat tersusun. Semoga buku ini dapat **memberi** manfaat bagi upaya membumikan pendidikan yang **berwawasan** budaya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2013
Dekan FIP UNY

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA

ISBN : 979-26-1970-4
978-979-26-1970-6

Hak Cipta dilindungi Undang - Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

Cetakan 1, Agustus 2013

Editor : Sujarwo
Sugeng Bayu Wahyono
Rukiyati
Iis Prasetyo
Dwi Ești Andriani
Layout & desain cover : Mareta Puspita

Percetakan
Ash-Shaff

Jl. Timoho No. 124 Yogyakarta 55224
Telp. (0274) 586243 Fax. (0274) 557793
Email: shaff_ash@yahoo.com

menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan penolakan-penolakan dari lembaga pendidikan yang tidak mau menerima sebagian anggota masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya, masih banyak anak-anak miskin di daerah tertinggal yang belum memperoleh kesempatan pendidikan. Implementasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan budaya masyarakat. Jadi budaya dimaknai sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu yang secara kolektif terbentuk oleh pendahulu-pendahulunya, kemudian ditransmisikan dari satu generasi ke generasi. Budaya secara khusus dicerminkan dalam bahasa, agama, pakaian, kebiasaan sosial dan aspek-aspek lainnya sesuai dengan tipikal atau kekhasan masing-masing budaya yang bersangkutan. Untuk memahami pendidikan populis yang berwawasan budaya disajikan gagasan dan pemikiran dari beberapa dosen pada isi buku ini. Semoga bermanfaat

Yogyakarta, 14 Agustus 2013

Editor

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
PENDIDIKAN POPULIS: IMPLIKASI METODOLOGIS PADA RISET PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI Ariefa Efaningrum, M.Si	1
URGENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN POPULIS PRO MASYARAKAT MISKIN Arif Rohman, M.Si	29
MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN PENDIDIKAN KHUSUS MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF Dr. Sari Rudiwati, M.Pd	58
BELAJAR MEMBANGUN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SEDERHANA S. Wisni Septiarti	88
MENJAGA KEHARMONISAN HIDUP DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA MELALUI PENDIDIKAN IPS Anwar Senen, M.Pd	111
ORIENTASI FILOSOFIS PENDEKATAN KONSELING: PENGARUH EKSISTENSIALISME DALAM KONSELING Sigit Sanyata, M.Pd	137
MENGEMBANGKAN SENSITIVITAS BUDAYA PADA PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK ANAK USA DINI Nala Ayriza, M.Si	162

DAUN PISANG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KONSEP PENJUMLAHAN BILANGAN PECAHAN DI SEKOLAH DASAR PADA PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK BERBASIS BUDAYA Rahayu Condro Murti, M.Si	182
KONSELING LINTAS BUDAYA: KONSTRUKSI HISTORIS DAN APLIKASINYA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH Agus Basuki, M.Pd	202
KONSEPSI BUDAYA MENURUT PETER L. BERGER DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN Entoh Tohani, M.Pd	223
KAPITALISME PENDIDIKAN VS PENDIDIKAN POPULIS: PENDEKATAN KULTURAL DAN MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN TERDIDIK Dr. Siti Irine Astuti Dwiningrum, M.Si	239
POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA LOKAL P. Sarjiman, M.Pd	280
PENDIDIKAN BAGI KAUM LANJUT USIA (UPAYA MEMENUHI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BERBASIS MODAL SOSIAL) Sri Iswanti, M.Pd	302
<i>GUIDANCE FOR ALL</i> SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA Sugiyatno	328

PENDIDIKAN POPULIS: IMPLIKASI METODOLOGIS PADA RISET PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

oleh:

Ariefa Efaningrum, M.Si
efianingrum@uny.ac.id

Pendahuluan

Proses dinamis perubahan sosio-budaya dalam masyarakat berimplikasi pada perubahan pada dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Demikian juga sebaliknya, dunia pendidikan diyakini memiliki kekuatan dan daya ubah untuk mentransformasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti analisis yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood (1994) bahwa para ilmuwan dan akademisi bukan hanya mencerminkan perubahan sosial, namun mereka pada dasarnya telah mendorong terjadinya perubahan itu sendiri. Karenanya, upaya teorisasi perlu dilihat dalam konteks sosio-budaya dalam masyarakat yang melingkupinya. Sebagaimana masyarakat pendidikan yang menjadi sasaran studinya, ilmu pendidikanpun senantiasa mengalami perubahan. Dalam rangka menghasilkan teori pendidikan yang relevan dengan praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat, agenda studi dan penelitian/riset pendidikan di perguruan tinggi hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat

kebernanan ilmiah, dan selalu mengembangkan budaya diskusi, budaya membaca, dan mengembangkan keprofesionalnya baik secara individual maupun berkelompok.

Daftar Pustaka

- Berger, L. Peter & Tuckman, Thomas. (1967). *The social construction of reality: A treatise of sociology of knowledge*. London: The Penguin Books .
- Dewey, John. (1997). *Experience and education*. New York: Touchstone Rockefeller Center
- Freire, Paulo. (1972). *Pedagogy of the oppressed*. Victoria: Penguin Books Ltd.
- Geger Riyanto. (2009). *Peter L Berger: perspektif metateori pemikiran*. Jakarta: LP3S.
- Hanneman Samuel. (2012). *Peter berger: sebuah pengantar ringkas*. Depok: Kepik
- Whitehead, Alfred. (1951). *The aims of education*. New York: The New American Library.
- Wuthnow, Robert. Et al. (1984). *Cultural analysis: the work of Peter L. berger, Mary Douglas, Michael Foulcault, and Jurgen Habermas*. London: Routledge & Kegan Paul

KAPITALISASI PENDIDIKAN VS PENDIDIKAN POPULIS: Pendekatan Kultural dan Modal Sosial Dalam Membangun Masyarakat Terdidik

Oleh :
Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si
ireneast@yahoo.com

Pendahuluan

Kapitalisasi pendidikan berkembang dalam proses pembangunan pendidikan. Pendidikan terus berkembang menjadi sebuah komoditas yang mengarahkan pada "profit oriented". Pendidikan tak bedanya dengan proses perdagangan dan jasa serta komoditas yang melahirkan proses ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin kuat. Pratek kapitalisasi pendidikan sebagai bentuk liberalisasi pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dari proses pendidikan di Indonesia. Liberalisasi pendidikan ditandai dengan semakin kuatnya modal peran asing dalam sektor pendidikan, disertai dengan menurunnya peran pemerintah dalam pengaturan pendidikan. Otonomi pengaturan lebih kuat pada penyelenggara pendidikan. Demikian halnya, orientasi keuntungan menjadi bagian penting dalam tujuan proses pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan menjadi mahal, berkurangnya kesempatan pendidikan yang sama dalam berbagai jenjang pendidikan

tinggi menjadi fenomena sosial yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Globalisasi menguatkan praktek kapitalisasi pendidikan. Globalisasi merupakan hubungan yang tidak setara antar negara, lembaga, dan aktornya. Hubungan antar negara lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Sistem ekonomi kapitalisme sudah berkembang pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dunia pendidikan nasional yang berkembang pada era perdagangan bebas semua negara anggota WTO yang sudah menandatangani *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain: layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan, serta jasa-jasa lainnya.

Kapitalisasi pendidikan telah mengubah peran pendidikan nasional. Peran sosial pendidikan bergeser ke peran industri dan jasa. Liberalisasi pendidikan mengurangi peluang dan kesempatan rakyat untuk memperoleh hak pendidikan untuk bersekolah yang menjadi tanggung jawab Negara. Kapitalisasi pendidikan masuk dalam semua level pendidikan nasional sebagai contohnya dengan disyahkan UU BHP yang cenderung

mengembangkan nilai-nilai yang berorientasi pada penumpukan modal dan pengembangan modal yang dipertahankan dalam iklim globalisasi yang berkembang tidak adil karena monopolistik atas kekuasaan pasar. Pada akhirnya, kecenderungan pendidikan nasional di era globalisasi telah meminggirkan nilai kemanusiaan yang hakiki.

Substansi pendidikan yang bertujuan untuk memajukan tingkat kebudayaan manusia dan peradaban manusia terus menghadapi tantangan. Praktek pendidikan nasional yang berkembang dalam iklim kapitalisme yang monopolistik telah memarjinalkan eksistensi pendidikan untuk rakyat. Komersialisasi dan privatisasi pendidikan dalam prakteknya telah memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan yang dilakukan secara otonomi, sehingga pemerintah cenderung tidak campur tangan lagi dan peran investoe semakin kuat. Sebagai konsekuensinya rakyat yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, akan mengurungkan niatnya, karena biaya pendidikan sangat mahal. Di sisi lain, kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal tetapi cenderung diorientasikan untuk memenuhi tuntutan pasar global.

Fenomena sosial yang terus berkembang adanya kecenderungan yang lebih kuat bahwa orang miskin yang jumlahnya relatif banyak di Indonesia, masih terbelenggu dengan “kebodohnya”. Tujuan pemerintah untuk semua pendidikan gratis, demokratis dan berkualitas yang bisa diakses oleh seluruh rakyat masih belum terwujud. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan bahwa *education for all* masih sulit direalisasikan meski tetap harus diperjuangkan dalam kepentingan global.

Kapitalisasi pendidikan telah menggeser hak warga untuk mendapatkan pendidikan. Bagi Indonesia proses kapitalisasi pendidikan ditandai dengan belum terwujudkannya pasal 31 UUD 1945 pada kehidupan masyarakat Indonesia. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang dicipta oleh sistem pendidikan terus terjadi. Ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi terutama pada anak-anak terlantar yang tidak dapat akses pendidikan semakin bertambah. Sebagaimana laporan sebuah LSM yang menyatakan, 26% dari 90,2 juta anak di Indonesia tidak memiliki kartu identitas, baik berupa akta kelahiran maupun kartu tanda penduduk (KTP). Anak-anak tanpa nama, tanpa negara, dan tanpa masa lalu ini ada sekitar 23,5 juta.

Kapitalisasi pendidikan juga menghambat pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Kesetaraan

kesempatan pendidikan merupakan konsep yang kompleks. Kesetaraan kesempatan pendidikan tidak menjabarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi sekedar membahas apa yang sebaiknya, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan—dan, tentunya, orang tidak selalu sependapat mengenai apa yang sebaiknya itu. Orang yang mendefinisikan kesetaraan berpijak pada landasan moral. Moralisasinya jadi baik—atau bahkan perlu—namun ini membuat pemahaman kita tentang persoalan kesetaraan kesempatan pendidikan dan pencapaian definisi yang universal tentang konsep itu menjadi amat sangat sulit (Tesconi & Hurwitz, 1974: 66-67). Banyak bukti menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pendidikan tidak merupakan jaminan untuk menciptakan kesetaraan status sosial-ekonomi dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya kesetaraan status sosial-ekonomi tidak menjamin kesetaraan dalam pendidikan. Dalam hal ini, kaum egalitarian tetap ingin mempertahankan pandangan yang lebih tegas yakni kebijakan ‘pemerataan’ (*levelling*) di segala bidang (<http://pendidikanbangsa.wordpress.com/bab-1-egalitarianisme/kesetaraan-dalam-pendidikan-pendidikan-untuk-kesetaraan> diunduh 20 Juli 2013).

Membangun optimisme di kalangan kaum marginal untuk mendapatkan kesempatan dan hak pendidikan

dalam sistem yang kapitalistik menarik untuk dikaji, sehingga terbangun kesadaran yang kuat bagi rakyat untuk berjuang dalam pendidikannya. Makalah ini mencoba memaparkan pendekatan kultural dan modal sosial dalam pembangunan pendidikan populis, reformasi peran sosial sekolah dalam mereproduksi pendidikan populis, peran guru dalam membentuk masyarakat terdidik yang antisipatoris.

Pendekatan Kultural dalam Membangun Pendidikan Populis

Paradoks dalam pembangunan pendidikan menjadi fenomena sosial yang terus terjadi; Ketimpangan kualitas dan masalah kesetaraan pendidikan masih menjadi masalah yang sangat kompleks dalam mengatasi pendidikan di Indonesia. Perbedaan kualitas pendidikan antar level pendidikan masih sulit diatasi oleh pemerintah. Bahkan kebijakan pemerintah untuk perbaikan kualitas pendidikan justru menambah perbedaan kualitas semakin kuat, sebagai contohnya adanya sekolah SSN, Sekolah Bertaraf Internasional ataupun munculnya berbagai jenis nama sekolah yang "elite" terus berkembang, yang membuktikan masih adanya perbedaan status dalam sekolah. Sebagai konsekuensinya kalangan elite dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah favorit atau yang dikenal dengan sekolah "elite", sedangkan bagi kalangan

ekonomi menengah ke bawah sekolahnya serba terbatas dan masih banyak kalangan yang tidak mampu memasukkan anaknya ke sekolah lantaran terganjal masalah keuangan.

Ambiguitas dalam pendidikan menjadi fenomena sosial. Pada konteks inilah, globalisasi pendidikan menunjukkan kepentingan dan kepeduliannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menuju standar global. Pada dimensi lain, kecenderungan mengarah pada peran pendidikan sebagai instrumen eksploitasi ekonomi terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Pertama, pendidikan dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pencerahan, pembinaan, pendidikan, pelatihan kapitalis kepada masyarakat dunia. Masyarakat dunia dipaksa untuk kepentingan 'contens pendidikan' yang kapitalis untuk menerima sebuah kenyataan bahwa globalisasi apapun aspek dan sektornya, termasuk hukum hidup di era global, merupakan satu fakta yang harus diterima. Para praktisi menawarkan liberalisasi pendidikan sebagai bagian dari usaha mengglobalkan dunia pendidikan dan meraih standar global. (<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/04/06/globalisasi-implikasinya-terhadap-dunia-pendidikan> diunduh 21 Juli 2013).

Pendidikan populis eksistensinya semakin melemah dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia. Ada kecenderungan yang semakin kuat bahwa pemerintah belum dapat menjalankan dalam program pendidikan dengan optimal. Kesetaraan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan cukup kuat diatur oleh Undang-undang dasar 1945, tetapi yang lebih penting adalah penerapan kebijakan pendidikan yang secara adaptif mampu merespon perubahan sosial yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Kebijakan pendidikan yang berwawasan pendidikan populis pada intinya akan berhadapan dengan persoalan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial dan kerentanan sosial, hal tersebut membawa implikasi bahwa pembangunan pendidikan tidak terlepas dari upaya mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat. Pendidikan tidak secara otomatis akan mengurangi jumlah orang miskin dan sebaliknya orang miskin berkurang karena mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Banyak riset yang membuktikan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh besar dalam menentukan kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi siswa. Fakta lapangan ini membuktikan bahwa tuntutan kesetaraan dalam pendidikan tidak dengan sendirinya melahirkan kesetaraan status sosial ekonomi dalam masyarakat. Demikian halnya, faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan perbedaan pendidikan yang diperoleh siswa,

maka cara untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan adalah dengan membangun sekolah yang sesuai bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonominya. Lagi pula, berhasil tidaknya siswa dalam pendidikan lebih banyak ditentukan oleh faktor internal pendidikan seperti mutu pengajaran, kurikulum dan kemampuan siswa. David Cooper menolak doktrin kesetaraan 'distribusi kebutuhan manusia' (*distribution of human goods*). Doktrin ini berpendapat bahwa perbedaan dalam dunia pendidikan dapat diatasi bila kebutuhan manusia dapat dipenuhi sehingga setiap orang dapat berkonsentrasi penuh untuk melanjutkan pendidikan. Pandangan ini mengandaikan bahwa orang yang tidak sibuk dengan kebutuhan sehari-hari dengan sendirinya akan mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Realitasnya banyak anak yang berasal dari keluarga yang mampu tidak sanggup menyelesaikan pendidikannya.

(David Cooper,

<http://pendidikanbangsa.wordpress.com/bab-1-egalitarianisme/kesetaraan-dalam-pendidikan-pendidikan-untuk-kesetaraan> diunduh 20 Juli 2013). Realitas tersebut membuktikan bahwa kesuksesan dalam kehidupan pada akhirnya tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan saja, tetapi banyak unsur yang terlibat didalamnya. Pandangan yang menyatakan bahwa kesuksesan dalam pendidikan adalah prasyarat untuk sukses dalam kehidupan masyarakat masih

perlu dikaji kembali, karena banyak faktor yang terlibat dalam mendorong individu bisa berkembang lebih optimal. Kemampuan mengembangkan mobilitas sosial merupakan salah satu strategi yang harus dikembangkan oleh warga masyarakat untuk mengembangkan eksistensi dan posisinya.

Kebijakan pendidikan populis harus dibangun dalam perspektif kultural. Dalam konteks inilah, sistem pendidikan digambarkan sebagai bagian yang terintergrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu keutuhan. Dalam hal inilah, antara negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Kekuatan dalam perspektif ini ialah sistem pendidikan dapat mengubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir lebih terbuka dan reflektif. Peran negara dalam perspektif lebih bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara (Tilaar, 2003:154). Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan bukanlah kepanjangan dari kekuasaan negara, tetapi merupakan partner dari negara dalam melaksanakan kekuasaannya. Demikian juga, pendidikan tidak terlepas dari sistem budaya dengan nilai-nilai serta kehidupan ekonomi dalam masyarakatnya. Masalah kemiskinan bukan hanya

masalah ekonomi tetapi juga masalah pendidikan yang perlu ditangani bersama.

Peran negara dalam pembangunan pendidikan harus diubah dalam menghadapi masyarakat kapitalistik. Peran pemerintah dalam pendidikan haruslah dibangun dengan pendekatan kultural, yakni dengan memperhatikan dinamika perubahan peran pendidikan pada masa lalu ke sekarang dan masa depan. Perubahan peran negara dalam pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut (Tilaar, 2003:156-157) :

Tabel 1. Perubahan Peran Negara Dalam Pendidikan

Peran	Masa Lalu	Sekarang dan Masa depan
Pemerataan pendidikan	Berorientasi target	Berorientasi kualitas
Kualitas	Dicapai melalui evaluasi dan standarisasi semu melalui tujuan terpusat dan kurikulum baku yang bersifat nasional.	Sebagai prioritas utama yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Proses	Tidak dipentingkan;	Sangat penting

	yang penting adalah terciptanya target kuantitatif.	karena yang dipentingkan adalah perubahan tingkah laku dan "outcome" pendidikan.
Metodologi	Indoktrinasi	Dialogis
Manajemen	Negara dan birokrasinya	Pemerintah sebagai partner yang cukup menetapkan arah.
Pelaksanaan servis pendidikan	Pelaku utama	Pemerintah sebagai partner yang cukup menentukan arah.
Perubahan sosial	Terarah dan opresif	Demokratis dan grass-root
Perkembangan demokrasi	Menentukan bingkai kehidupan berdemokrasi terbatas pada prosedur.	Mengembangkan perubahan tingkah laku demokratis secara substantif.
Perkembangan sosial-	Bukan menjadi bahan pertimbangan	Salah satu komponen

ekonomi masyarakat setempat.	penyusunan kurikulum.	pokok penyusunan kurikulum.
Perkembangan nilai-nilai moral dan agama.	Ditentukan oleh pemerintah pusat.	Berakar dari budaya atau agama setempat.
Nasionalisme	Pemaksaan dari atas dan bersifat formalitas. Mengabaikan identitas daerah.	Pendekatan multikultural.
Pendanaan	Seluruhnya menanggung pembiayaan pendidikan. Dana sebagai alat pelestarian kekuasaan pemerintah.	Selektif sebagai lembaga pemersatu nasional dalam pemerataan, kualitas, dan persatuan nasional.
Pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun	Ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat.	Sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi daerah.

Dalam perspektif kultural, peran pendidikan oleh negara yakni dengan menempatkan pendidikan sebagai hak azasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk merealisasinya. Demikian halnya, dalam pelaksanaan tugas negara, khususnya pada pendidikan dasar harus mampu merespon perubahan sosial yang terus terjadi. Peran negara dalam era otonomi daerah adalah mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Lebih lanjut lagi, peran negara dalam proses pendidikan harus memperhatikan yakni perspektif mikro dan perspektif studi kultural yakni memperhatikan proses belajar-mengajar dan melihat pendidikan sebagai bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem budaya, sosial dan budaya, politik dan ekonomi. Pendidikan dapat menjadi penggerak dari tumbuhnya kehidupan demokrasi dan juga merupakan komponen dalam pengentasan kemiskinan (Tilaar, 2003:158). Dalam pendekatan kultural pendidikan menjadi dinamisor perubahan kehidupan sosial-ekonomi dan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan menjadi sumber masalah sosial, karena kegagalan dalam menjalankan peran dan fungsi sosialnya.

Pendekatan kultural dalam pembangunan pendidikan hasilnya lebih bermakna bagi masyarakat. Karena dalam proses pembangunannya mengembangkan potensi manusia

dan kesempatan manusia untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk dapat merealisasikan *education for all* yang menjadi hak pendidikan. Pendidikan untuk semua orang harus tetap menjadi perjuangan setiap bangsa, tanpa membedakan kalangan "elite" dan "populis". meskipun dalam perbedaan struktur sosial-ekonomi yang berbeda tidak mudah untuk merealisasikan tujuan *education for all*. Dengan pendekatan kultural diharapkan akan terbangun kembali kebijakan pendidikan yang populis yakni dengan membangun tujuan bersama dan kepentingan yang sama untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Hal ini tidaklah mudah karena proses pendidikan tidak lepas dari berbagai kepentingan dan kebutuhan kelas sosial tertentu. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki tujuan berbeda antar sekolah satu dan yang lainnya tetap harus memperhatikan hakikat pendidikan untuk tidak tereduksi oleh tujuan pragmatis.

Pendekatan kultural dalam membangun pendidikan yang populis memerlukan kompetensi budaya masyarakat, khususnya terkait dengan kesempatan pendidikan dasar (Dwiningrum, 2013). Membangun kompetensi kultural menjadi prasyarat penting dalam mengatasi masalah pendidikan dasar di Indonesia (Dwiningrum, 2013).

Kompetensi kultural menjadi unsur pokok dalam membentuk masyarakat pembelajar yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni (2011:35) bahwa ada empat faktor pembentuk kompetensi kultural: a) penguasaan pengetahuan, b) daya kritis, c) kemampuan mengembangkan sesuatu atau pengetahuan, d) kemampuan praktis. Keempat faktor tersebut tidak statis, melainkan dinamis, terus berlangsung tidak kenal henti, terus berkembang, berinteraksi dan saling memberikan umpan balik satu sama lain. Dalam proses interaksi tersebut memiliki sifat kontekstual, berproses dengan menyesuaikan pada kondisi dan situasi yang ada. Proses yang terjadi menghasilkan berbagai output yang bisa menjadi umpan balik bagi masing-masing faktor yang ada.

Kebijakan pendidikan populis dengan pendekatan budaya ditentukan oleh kekuatan pemerintah untuk mengatasi masalah struktur dan kultur masyarakat secara luas. Pendekatan budaya dalam mengembangkan pendidikan populis berarti mengatasi masalah struktur masyarakat yang masih menggambarkan ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup kuat. Sedangkan dimensi budaya masih dihadapkan pada masalah rendahnya kesadaran akan budaya sekolah pada kalangan masyarakat miskin karena kondisi dan situasi sosial yang menjadikan mereka lebih senang bekerja daripada

bersekolah. Anak-anak miskin cenderung membantu orangtua mencari kebutuhan hidup sehari-hari daripada bersekolah. Kebijakan sekolah untuk memberikan subsidi bagi orang miskin untuk bersekolah tidak akan berhasil dengan optimal jika tidak dibangun oleh perubahan struktur ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Subsidi dana pendidikan tak cukup untuk membangun kesadaran bersekolah jika rakyat masih belum tercukupi makan-sandang dan papan yang minimal.

Demikian halnya, kebijakan pendidikan yang harus dikembangkan oleh pemerintah harus menyentuh dimensi yang sangat kuat dan penting dalam kehidupan masyarakat miskin. Salah satu unsur penting yang menjadikan kaum marjinal terus bertahan dalam tekanan struktur sosial, karena masih adanya modal sosial yang melekat dalam komunitas mereka. Namun demikian, modal sosial yang dimiliki oleh mereka belum dijadikan sebagai energi sosial yang mampu menggerakkan mereka untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih kuat sehingga mampu membangun kekuatan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat kapitalistik yang cenderung mempertimbangkan profit dalam setiap kali melakukan hubungan-hubungan sosial. Modal sosial yang sebagai energi sosial yang menggerakkan kompetensi budaya masyarakat

adalah aspek penting dibangun dalam kebijakan pendidikan populis. Dalam hal ini, kekuatan modal sosial diperlukan untuk membangun kembali fungsi sosial sekolah sebagai lembaga strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik lebih optimal bagi seluruh rakyat.

Modal Sosial dan Reformasi Fungsi Sosial Sekolah

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang strategis dalam mengembangkan peserta didik. Sekolah menjadi salah satu sumber konflik, karena menghasilkan sistem kelas sosial. Dalam perspektif konflik, lembaga pendidikan atau sekolah berfungsi melayani kepentingan kelompok yang dominan, berkuasa dan kaya, dengan melanggengkan kesenjangan sosial ekonomi melalui kontrol atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap yang sesuai dengan kelas masing-masing. Dalam konteks inilah, proses pendidikan merupakan cerminan dari hubungan sosial dan ekonomis.

Pendidikan merupakan variabel yang menciptakan sistem kelas atau status sosial. Dalam pemikiran Weber pendidikan merupakan variabel kelas atau variabel status. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat seseorang melalui pendidikan di sekolah dapat mempertinggi kemampuan (kesanggupan) di dunia ekonomi yang akan

prespektif teknokratis modern, bahwa masyarakat industrialisasi memerlukan banyak angkatan kerja yang profesional terutarna pada pengetahuan teknologi. Sebagai suatu variabel status maka pendidikan mengarah ke suatu gaya hidup dan pola konsumtif yang berbeda dengan golongan lain (kelas buruh). Golongan berpendidikan ini menjadi eksklusif dan memonopoli gaya hidup tertentu serta membuat batas-batas dari golongan lain agar tetap berada di luar golongan ini. Salah satu cara yang mudah dilihat adalah dengan memberikan gelar-gelar dari fakultas. Jadi, pada variabel status, tekananya bukan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan di pasaran kerja, tetapi pada kehidupan yang memisahkan golongan tertentu dari golongan lain. Dengan membuat unit-unit (seperti gelar-gelar tersebut). Weber mengemukakan bahwa stratifikasi merupakan akibat kekuatan sosial yang berasal dari tiga sumber kekuatan ekonomi ; kekuatan prestise; dan kekuatan politik (M. Sastrapratedja , S.J., 1999).

Analisis Weber menguatkan asumsi umum bahwa eksistensi pendidik kaum elite sulit dihilangkan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, kekuatan ekonomi digambarkan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekuatan ekonomi merupakan kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Lebih

lanjut dijelaskan bahwa modal adalah salah satu penyebab seseorang mampu menarik keuntungan, sedangkan yang lain disebabkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya yang dapat dijual di pasar kerja. Faham Weberian beranggapan bahwa keterampilan-keterampilan yang dituntut pada pekerjaan (pasar kerja) dapat diajarkan secara efisien di tempat kerja. Demikian halnya, lembaga pendidikan dikuasai oleh kaum elit yang menggunakannya terutama untuk mengadakan batas-batas dengan golongan lain demi kepentingan kelasnya. Hal ini membuat golongan kelas bawah menjadi sulit untuk mencapainya, karena lembaga pendidikan (terutama pendidikan tinggi) membuat aturan-aturan yang hanya dapat dipenuhi kaum elit yang mampu biasanya hanya dari kelas menengah ke atas (M. Sastrapratedja, S.J., 1999)

Eksistensi sekolah tetap menjadi perdebatan yang menarik. Namun demikian, keberhasilan pembangunan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan sekolah dalam menjalankan peran sosialnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tergantung pada kemampuan sekolah untuk menjalankan fungsi sosialnya. Sekolah memiliki peran penting untuk mengajarkan nilai-nilai sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan

bermasyarakat antar generasi. Sekolah mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi masyarakat, baik secara personal maupun sosial. Sekolah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang tertib. Sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim, sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas sosialisasi generasi muda, bertujuan agar menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri anak, sejumlah kondisi fisik, intelektual dan moral yang dituntut oleh masyarakat politis secara keseluruhan dan lingkungan khusus dimana dia berada (Ritzer, 1983).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi sudah mulai kehilangan fungsi sosialnya, karena tujuan-tujuan pragmatis yang harus direkonstruksi oleh kepentingan kelompok masyarakat. Sekolah cenderung mengutamakan fungsi ekonominya daripada fungsi sosial. Untuk mengembalikan peran utamanya, sekolah harus dikembalikan pada fungsi utamanya, sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons fungsi sekolah adalah (1) Sekolah berfungsi sebagai sarana sosialisasi utama, (2) Sekolah berfungsi sebagai seleksi dan alokasi tenaga kerja, dan (3) Sekolah berfungsi memberikan kesempatan yang sama. Sebagai sarana sosialisasi, Parsons melihat dua fungsi dari sekolah; pertama, mengarahkan anak dari orientasi kekhususannya (terbatas) ke orientasi universalistis (umum)

dan dari orientasi askriptif (sesuatu yang didapat bukan dengan usaha) ke prestasi; kedua, alokasi seleksi atau diferensi ke peran-peran orang dewasa. Parsons mengakui bahwa ada sarana lain yang terlibat dalam proses sosialisasi, termasuk keluarga dan lembaga lain, tetapi sekolahlah yang merupakan sarana sosialisasi utama, terutama dalam fungsinya mensosialisasikan individu ke berbagai komitmen dan kapasitas yang merupakan syarat esensial dari kegiatan dan peran mereka kemudian hari. Komitmen itu adalah komitmen: (1) terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan (2) terhadap peran tertentu di dalam struktur social (Ritzer, 1983).

Sekolah seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk belajar tentang peran sosial. Meskipun dalam realitasnya tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Parson menyadari bahwa tidak semua siswa yang diberi kesempatan sama akan berhasil sama pula. Hal ini disebabkan karena proses selektif cenderung berlangsung dalam sosialisasi pra sekolah. Fungsi sekolah adalah untuk lebih memastikan bahwa siswa diperlukan secara universal atau secara jujur dan adil, diberi kesempatan untuk mencapai sukses sesuai dengan kemampuan peserta didik. Namun demikian, ada

kecenderungan bahwa proses belajar di sekolah juga tidak lepas dari hambatan-hambatan sosial-ekonomi dan psikologis yang dialami oleh peserta didik. Sebagai akibatnya tidak semua siswa berhasil dalam meraih prestasi yang sama. Realitas tersebut menjadi satu kesadaran bersama bahwa perbedaan individual tetap menjadi salah satu kajian bagi peserta didik untuk terus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang terus memberikan kesempatan pada setiap individu dalam meraih prestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik.

Gerakan sosial untuk mengembalikan fungsi sosial sekolah harus terus diperjuangkan oleh masyarakat sebagai gerakan moral. Hak bersekolah harusnya menjadi bentuk kesadaran moral yang diperjuangkan oleh semua elemen masyarakat dalam melawan kepentingan pendidikan elite. Dengan demikian, pembangunan pendidikan tidak cukup diatur oleh kebijakan pendidikan yang normatif, tetapi membutuhkan kemampuan implementatif yang proaktif dalam mengatasi perbedaan dan kendala sosial-ekonomi-budaya yang menghambat tujuan pembangunan. Reformasi peran sosial sekolah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan pendidikan. Dalam konteks inilah, sekolah harus ditempatkan dalam peran strategisnya dalam membentuk masyarakat terdidik dalam konteks yang lebih

luas.

Membangun masyarakat terdidik membutuhkan modal sosial. Realitas sosialnya, dunia pendidikan belum menilai peran modal sosial sebagai aspek yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Ada keenderungan bahwa sekolah belum menyadari dan menganggap penting bahwa modal sosial adalah sangat strategis untuk dikembangkan dalam pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam proses belajar didalam keluarga maupun sekolah. Bahkan, ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum menyadari apa dan bagaimana modal sosial dikembangkan sebagai aspek penting dalam perbaikan kualitas pendidikan. Fenomena modal sosial justru semakin melemah, bahkan mulai tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidik. Realitas ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat akan peran modal sosial, sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan (Dwiningrum, 2013).

Modal sosial dibutuhkan dalam membangun pendidikan populis. Sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu bahwa modal hubungan sosial yang diperlukan

untuk dukungan-dukungan bermanfaat seperti halnya modal harga diri dan kehormatan jika orang ingin ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbali balik pengenalan dan pengakuan yang seikit banyak terinstitusionalisasikan. Erat dan tahannya ikatan sama vitalnya: Modal sosial mempresentasikan 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Ikatan antara koneksi sosial dan modal budaya atau modal finansial dengan mencontohkan profesi, seperti pengacara dan dokter yang memanfaatkan "koneksi sosial". Koneksi sosial memerlukan kerja (dalam John Field, 2010:23). Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial (Hauberer, 2011:250 dalam Dwiningrum 2013). Dalam konteks inilah, modal sosial menjadi aspek penting bagi rakyat yang berkeinginan melakukan mobilitas sosial dalam proses kehidupannya.

Pendidikan tidak cukup untuk mengubah strata sosial, tetapi dengan kekuatan modal sosial, maka setiap orang mempunyai kesempatan dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dengan melakukan mobilitas sosialnya yang menjadi dinamika dalam membentuk masyarakat terdidik.

Reproduksi Budaya Masyarakat Terdidik

Keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi sosialnya akan memberikan warna kehidupan yang harmoni dan bermakna. Pendidikan menjadi bermakna karena mampu membangun masyarakat terdidik. Masyarakat yang secara empirik digambarkan dengan munculnya kesadaran baru bahwa semua orang ingin bersekolah. Masyarakat punya semangat untuk membangun budaya sekolah dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan pembangunan pendidikan ditandai dengan membangun masyarakat terdidik. Gambaran masyarakat terdidik dibayangkan oleh John I. Goodlad dengan banyaknya anak-anak, remaja dan dewasa yang mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Di sebagian besar masyarakat aktivitas belajar, kursus-kursus di hampir segala bidang mudah dijumpai. Di samping itu, masyarakat antusias untuk belajar dan membaca; buku, majalah, video dapat diperoleh dan diakses dengan mudah oleh warga masyarakat. Dengan

segala kekayaan dan keragaman sarana belajar semua warga dengan mudah untuk menyekolahkan anak-anak dan remaja sampai minimal usia 16. Fenomena masyarakat terdidik masih harus diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang belum memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan pada level pendidikan tinggi dan akses pengetahuan yang masih terbatas.

Bagi Indonesia, kesempatan pendidikan belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat, bahkan gambaran pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan sosial-ekonomi masih kuat mewarnai dalam kehidupan sosial. Apalagi kesempatan akses pengetahuan belum menjadi kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Realitas sosial inilah yang semakin menguatkan sulitnya untuk membangun pendidikan populis. Pendidikan populis akan bisa direalisasikan jika pemerintah benar-benar menata sistem persekolahan formal dengan memberikan akses pengetahuan yang merata pada semua warga masyarakat melalui sistem persekolahan formal dengan usia yang telah ditentukan dengan jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh John I. Goodlad (1984, 130-140) bahwa setidaknya tiga proposisi untuk mendukung sistem persekolahan formal untuk usia yang telah ditentukan. Yang pertama ialah adanya sifat penting pikiran, kecakapan komunikasi, dan penambahan

pengetahuan yang hanya bisa diperoleh melalui pengembangan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Karena semua ini kecil kemungkinan untuk diperoleh dalam situasi santai, pembelajaran yang diperlukan haruslah diseleksi dan disediakan di sekolah. Kedua, dalam masyarakat demokratis semua individu berhak memperoleh akses belajar dan bersekolah. Ketiga, masyarakat yang menganut sistem prinsip demokrasi mensyaratkan agar sebagian besar warganya memiliki sifat penting pemikiran, kecakapan dan pengetahuan dan karenanya mereka perlu bersekolah. Dua proposisi terakhir itulah yang mendasari wajib belajar sampai usia 16 tahun di sebagian besar negara bagian Amerika. Bagi Indonesia, wajib belajar sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada intinya memiliki ketentuan umum bahwa wajib belajar adalah program pemerintah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya, penjaminan wajib belajar sudah dirancang dengan detail yang pada intinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; Warga negara Indonesia yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan; Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan (Sairin, 2012:143-144). Namun demikian, implementasi wajib belajar masih menghadapi kendala struktural dan cultural sehingga akses pengetahuan belum merata dalam masyarakat Indonesia.

Akses pengetahuan sesungguhnya sudah menjadi acuan dalam merancang pembangunan pendidikan di Indonesia. Banyak program pro-rakyat dan pro-orang miskin sudah diupayakan oleh pemerintah. Persoalan yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah kesungguhan

untuk membangun kondisi sosial-budaya-ekonomi yang mendukung proses pembangunan pendidikan benar-benar bisa direalisasikan. Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan struktur dan masalah kultur yang cukup kompleks sehingga membangun masyarakat terdidik perlu memperhatikan dimensi struktur dan kultur masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh John I. Goodlad (1984,130-160), bahwa ketiga proposisi dari hasil pengalaman di Amerika Serikat jarang dipertanyakan, demikian kasus yang terjadi di Indonesia, banyak sekali program-program pemerintah tentang pendidikan kurang dikontrol, dimonitoring, dievaluasi sosial efeknya bagi kehidupan sosial. Belajar dari Amerika, saran yang menarik untuk dikritisi terhadap proposisi pembangunan pendidikan (Goodlad 1984: 130-160): 1) Menyediakan pendidikan *gratis* sampai taraf tertentu yang titik utama untuk memasuki dunia kerja; 2) Menyiapkan kurikulum umum untuk semua siswa, apa pun latar belakangnya; 3) Sebagian secara terencana dan sebagian karena rendahnya kepadatan penduduk, asalkan anak-anak dari latar belakang yang berbeda itu memasuki sekolah *yang sama*; 4) Mewujudkan kesetaraan di daerah tertentu, karena pajak daerah menjadi sumber dukungan bagi sekolah. Bagi Indonesia, proposisi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk mengkaji kembali peran negara dalam merealisasikan

kebijakan pendidikan. Karena sampai saat itu, perubahan kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan setralistik ke desentralistik, perubahan kebijakan kurikulum, perubahan kebijakan anggaran pendidikan, perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan belum secara signifikan mengubah wajah pendidikan di Indonesia.

Kegagalan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan masih lemahnya akses pengetahuan warga masyarakat. Ada kecenderungan bahwa warga masyarakat belum meletakkan kekuatan pengetahuan sebagai kebutuhan dasar yang mendorong proses pembangunan pendidikan yang mendorong masyarakat ingin belajar di sekolah. Hal ini terjadi karena tatanan sosial dan ekonomi belum mampu membentuk lingkungan masyarakat yang kondusif untuk belajar dan bukan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Goodlad (1984,130-160), bahwa sekolah dan konteks reproduksi budaya menunjukkan bahwa lingkungan rumah, terlepas dari pengaruhnya yang kian menurun, bisa menguntungkan atau merugikan anak-anak dalam bermacam cara—terutama pemerolehan kemampuan bahasa, sikap terhadap orang lain, nilai sosial dan ekonomi, stamina fisik, kebiasaan sehat, dan lain-lain. Sekolah, dengan kecilnya persentase waktu yang tersedia, hanya bisa berusaha secara realistis

untuk mengubah atau sedikit membentuk bagian-bagian yang didominasi oleh lingkungan rumah dan memiliki pengaruh besar mengembangkan pengetahuan tertentu. Sekolah dirancang untuk menghindari penguatan ketidakadilan yang dialami di lingkungan rumah, yang dalam prakteknya tidak mudah dilakukan oleh guru, karena para guru sendiri mencerminkan status mereka dalam budaya kelasnya. Konsekuensinya, jika sekolah hanya akan menjadi pelestari dari apa yang terjadi di masyarakat, distrik sekolah negara bagian dan daerah—jika mereka peduli—harus menetapkan kebijakan sekolah yang dalam taraf tertentu dapat meminimalkan peran ruang kelas sebagai pereproduksi budaya.

Realitas tersebut membuktikan bahwa membangun masyarakat terdidik bagi kepentingan peserta didik tanpa membedakan kelas sosial menjadi persoalan tersendiri. Ada kecenderungan yang semakin kuat bahwa pendidik tidak begitu peduli untuk memiliki sekolah yang dapat mengatasi apa ditanamkan secara berbeda di lingkungan rumah. Kesetaraan akses umum memasuki sekolah akan menentukan kesetaraan hasil belum menjadi perhatian utamanya. Demikian halnya, orang yang mengancam ketidakadilan sosioekonomi secara langsung kurang memiliki minat terhadap apa yang mereka lihat sebagai

peran sekolah yang relatif kecil. Sekolah mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat Akibatnya, tidaklah mudah untuk mengatasi ketidakadilan di dalam sekolah.(Goodlad 1984:130-160). Dalam konteks inilah, ketidakadilan seringkali dibangun dari proses reproduksi di sekolah. Anak-anak yang lahir dalam kondisi "ketidakadilan" kadang berdampak jangka panjang pada proses belajar peserta didik yang merasa tidak diperlakukan "adil" dalam kehidupannya. Oleh karena, para pendidik harus memiliki spirit yang sama untuk bersikap adil dalam mendidik.

Lebih khusus lagi, masyarakat terdidik mulai terbentuk dalam proses belajar di sekolah. Reproduksi budaya dalam membangun kebiasaan belajar pada peserta didik tidak mudah, jika budaya sekolah kurang mendukung tujuan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Goodlad (1984), bahwa perusahaan, dan industri mengklaim bahwa kaum muda yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi atau pekerjaan dengan gaji tinggi, kurang siap untuk terlibat dalam kegiatan membaca, menulis, berpikir dan menjalin hubungan antar sesama, yang mana itu semua diperlukan. Kondisi tersebut merupakan contoh empirik bahwa proses belajar tidak sekedar bicara soal kesempatan untuk belajar, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses belajar tersebut berlangsung di ruang kelas dan apa

yang diperoleh dari proses belajar bagi pemanfaatan untuk kehidupan sosial peserta didik. Sekolah tetap dituntut untuk merespon perubahan dan tantangan kebutuhan pengetahuan yang relevan dengan lingkungan hidup maupun lingkungan kerja, sehingga pengetahuan yang diperoleh dari belajar benar-benar bermakna bagi kehidupan.

Reproduksi budaya belajar sangat ditentukan oleh kualitas guru dalam mengajar di kelas. Seorang guru harus melakukan persiapan profesional yang lebih mendalam dan menyeluruh, yang melibatkan sikap, pengetahuan. Sekolah harus membangun asumsi pendidikan yang lebih optimis bahwa hampir semua anak bisa belajar, diberi dukungan yang tepat, mendapat umpanbalik korektif, dan waktu. Kepala sekolah mendorong guru bertanggung jawab atas keberhasilan tiap peserta didik (Gooldlad, 1984). Budaya sekolah menjadi bagian penting disosialisasikan pada peserta didik agar memiliki kebutuhan belajar sepanjang hidupnya. Kegagalan dalam meletakkan budaya belajar sejak dini akan menyulitkan peserta didik untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-budaya yang membutuhkan kemampuan akses pengetahuan.

Membangun masyarakat terdidik tak dapat dipisahkan dari dinamika sosial. Sekolah harus berusaha

agar dapat mengatasi perbedaan individual dalam belajar. Karena peserta didik secara sosiologis berasal dari latar belakang sosial-ekonomi. Dalam proses belajar, pendidik harus memiliki prakarsa untuk berbuat lebih banyak berperan agar sekolah tidak mereproduksi dan melanggengkan praktek ketidakadilan. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap menyoroti kesetaraan akses untuk bersekolah. Ada harapan dan optimisme bahwa kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk-memberikan kesetaraan yang lebih besar terkait dengan pemberian akses pengetahuan di dalam dan di luar sekolah lebih luas.

Sekolah dalam masyarakat terdidik diharapkan mereduksi perbedaan individual dengan pemahaman yang empatik. Khususnya guru perlu menyadari bahwa perbedaan individual bukan menjadi dasar bahwa ada perbedaan dalam akses pengetahuan. Untuk itu, guru secara profesional harus mampu mengatasi perbedaan individual di kelas dengan menerapkan praktek mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru harus menyadari pentingnya memahami asumsi dan mitos masyarakat mengenai kecerdasan otak dan keterampilan tangan, siswa yang pandai dan yang bodoh, pembelajar yang cepat dan yang lamban, dan sebagainya, secara umum diterima

dan semenjak awal tertanamkan ke dalam penataan ruang kelas. Bagi guru adalah penting untuk menciptakan suasana yang meminimalkan dan mengompensasi kekurangan awal dalam belajar serta dapat mengatasi perbedaan individual dengan bijaksana. Peran guru untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal harus profesional. Guru harus benar-benar memahami peran pokoknya tujuan mengajar di kelas. Dari banyak kajian guru harus multi peran di kelas. Dari studi yang dilakukan oleh Peter Mortimore 1965. 53-60), tujuan guru mengajar di kelas antara lain adalah 1) Pengembangan pribadi, 2) Tujuan sosial dan moral, 3) Tujuan budaya, 4) Tujuan yang berkaitan dengan keterampilan dasar dan daerah subjek, 5) Otonomi, 6) Kompetensi intelektual umum, 7) Tujuan religius dan spiritual. Di samping itu, guru untuk bisa bersikap adil dalam proses belajar-mengajar di kelas perlu memahami perspektif pendidikan multikultural. Dengan mengembangkan perspektif multikultural maka bangunan pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan lebih optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni (2011) bahwa pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat, dan bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran, tetapi juga dengan pendidikan multikultural akan mentransformasi

kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik dan mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Demikian halnya, dengan pendidikan multikultural akan terbangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan.

Proses membangun masyarakat terdidik terus berhadapan dengan tantangan dan tuntutan global yang membutuhkan adaptasi sosial. Pendidikan masyarakat harus dikembangkan secara antisipatoris, sehingga proses adaptatif terjadi dalam pendidikan di sekolah maupun di kelas. Pendidikan antipatoris adalah memberikan peserta didik untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan yang mampu memberikan bekal pada peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Kebijakan pendidikan yang dikembangkan adalah mempersiapkan peserta didik untuk tiga tugas kehidupan, yaitu untuk dapat hidup (*to make living*); untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*); untuk turut memuliakan kehidupan (*to enable life*) (Buchori,2001:50-52).

Pendidikan antisipatoris memberikan perhatian pada proses belajar peserta didik pada realitas sosial.

Aktivitas sekolah tak dipisahkan dengan dunia nyata. Peserta didik diajak untuk dapat memaknai hidup. Karena dalam sistem pendidikan yang sering didiskusikan adalah "keberhasilan hidup" yang pada kenyataannya tidak selalu dimaknai kita "sukses". Namun demikian, kehidupan yang bermakna adalah masalah pribadi yang diartikan sebagai hasil dari pengenalan diri sendiri, dan pengetahuan mengenai bagaimana menyatakan diri secara berarti dalam berbagai kehidupan (Buchori, 2001:51). Dalam konteks inilah, proses pendidikan seharusnya mampu membentuk pribadi yang berkarakter dan bermakna untuk mengembangkan masyarakat terdidik, masyarakat yang terdiri dari kalangan elite dan populis untuk saling sinergis membangun sebuah kehidupan yang bermartabat.

Kapitalisasi pendidikan sulit untuk dihindari, tetapi dengan semangat populis yang sadar akan hak dan kewajiban untuk mendapatkan akses pendidikan, maka tak ada masalah untuk dapat mengembangkan pendidikan yang antisipatoris dalam semua level pendidikan sebagai hak rakyat. Membangun masyarakat terdidik harus menjadi impian seluruh komponen anak bangsa Indonesia yang secara konseptual sudah menjadi landasan kuat pembangunan bangsa Indonesia untuk terus diperjuangkan.

Penutup

Kapitalisasi pendidikan berkembang dalam proses pembangunan pendidikan telah menggeser hak pendidikan. Bagi Indonesia proses kapitalisasi pendidikan ditandai dengan belum terwujudkannya pasal 31 UUD 1945 pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan populis eksistensinya semakin melemah dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pendekatan kultural diperlukan dalam merealisasikan *education for all* atau pendidikan populis. Kesetaraan akses pengetahuan harus dikembangkan lebih luas agar sekolah tidak mereproduksi dan melanggengkan praktek ketidakadilan. Hak bersekolah menjadi gerakan sosial dan kesadaran moral yang diperjuangkan oleh semua elemen masyarakat dalam melawan kepentingan pendidikan elite.

Dengan kekuatan modal sosial, sekolah harus dikembalikan fungsi sosial dengan memberikan kesempatan dan kesetaraan yang lebih luas bagi rakyat untuk akses pengetahuan. Sekolah berusaha agar dapat mengatasi perbedaan individual dalam belajar dengan memberi kesempatan pada semua golongan untuk mendapatkan hak pendidikan yang antisipatoris dalam membangun masyarakat terdidik dalam menghadapi

tantangan global.

Daftar Pustaka

Buchori (2001), *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius

David Cooper,

<http://pendidikanbangsa.wordpress.com/bab-1-egalitarianisme/kesetaraan-dalam-pendidikan-pendidikan-untuk-kesetaraan> diunduh 20 Juli 2013.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2013), "Realisasi dan Eksistensi *Education for All* Sebagai Pemandirian Bangsa di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sosiologi", *Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Ass-Shaff

Field, John (2010), *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.

Goodlad, John (1984), *A Place Galled School*, New York: McGRAW-Hill Book Company.

Hasbullah. Jousairi (2006), *Social Capital*, Jakarta: M-R United Press

Hauberer, Julia (2011), *Social capital Theory*, VS Reseach.

Lin, Nan (2004), *Social Capital*, Australia : Cambrigde University

M. Sastrapratedja, S.J.(2000) dalam *Sosiologi Antropologi Pendidikan*, Yogyakarta: FSP Fakultas Ilmu Pendidikan

Mortimore, Peter (1965), *School Matters*, England: Open Book

Ritzer, George (1983). *Sociological Theory* (1983). Amerika: Alfred A. Knoff. Inc

Sairin, Weinata (2012), *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Media Prima Aksara.

Tecconi, JR Charless dkk (1974). *Education To Whom*, Haper & Row, Publisher.

Tilaar, H.A.R (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: INDONESIA TERATA

Zamroni (2011), *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama

kemajuan di semua aspek kehidupan. Namun demikian di sisi terdapat kemajuan, terdapat juga kemunduran pada kualitas perilaku manusia, yang sering disebut juga dengan karakter seseorang. Permasalahan karakter merupakan masalah yang kompleks yang bias melibatkan semua unsure di masyarakat.

Di lingkungan sekolah keberadaan konselor memiliki peran yang dominan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam kaitannya membentuk perilaku. Sampai saat ini konselor memang sudah bekerja sebagaimana mestinya, namun demikian peningkatan kualitas layanannya menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini dipandang perlu karena permasalahan kehidupan siswa dari waktu-kewaktu semakin kompleks, dan dipandang perlu dilakukan pendampingan agar perilakunya tetap positif untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Konselor dipandang perlu untuk menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan lingkungan keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama memantau dan memfasilitasi perkembangan siswa serta menjadi model atau teladan yang baik bagi perkembangan perilaku anak.

Daftar Pustaka

Badru Zaman dkk. 2008. *Media dan Sumber Belajar TK*. Jakarta : Universitas Terbuka

Depdiknas 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta; Depdiknas RI

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor Dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: PPB FIP UPI.

Hawari Dadang, 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & kamtibmas*. Jakarta : Bp. Dharma Bhakti

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 28 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi konselor.

Sugihartono dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press

Sutarjo Adisusilo, 2012, *Pembelajaran Nilai Karakter : Konstruktivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suyanto. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Sri Hastuti, 2008. *Bahan Diklat Profesi Guru Sertifikasi rayon 11 DIY Dan Jateng*. Departemen Pendidikan Nasional, Universitas negeri Yogyakarta.

Shetzer, B and Stone, S.C. 1981. *Fundamental of Guidance*. USA : Bruce Shetzer and Shelley C. Stone